



**RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON PURWOSARI
TAHUN 2025 - 2029**

KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.5 .	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1.	Letak Geografis dan Data Kewilayahan	7
2.1.2.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	17
2.1.3.	Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.1.4.	Kelompok Sasaran Layanan dan Kemitraan	26
2.1.5.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.1.6.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.	29
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	31
2.2.1.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.2.2.	Isu Strategis	33
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1.	Tujuan Renstra PD	44
3.2.	Sasaran Renstra PD	44
3.3.	Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	45
3.4.	Arah Kebijakan PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	47
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
4.1	Uraian Program	50
4.2	Uraian Kegiatan	50
4.3.	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.....	70
4.4.	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	85
4.5.	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	91
BAB V	PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk di Kapanewon Purwosari	9
Tabel 2.2. Jumlah Keluarga di Kapanewon Purwosari	10
Tabel 2.3. Jumlah Aparatur Pemerintah Kalurahan	10
Tabel 2.4. Infrastruktur Jalan dan Jembatan	11
Tabel 2.5. Pemenuhan kebutuhan air bersih	12
Tabel 2.6. Data Mata Air di Kapanewon Purwosari	14
Tabel 2.7. Data Usaha Penginapan	16
Tabel 2.8. Sarana Kesehatan	16
Tabel 2.9. Sarana Pendidikan Formal	17
Tabel 2.10. Data Jumlah KK yang Rumahnya Belum Terinstalasi Jaringan Listrik PLN	17
Tabel 2.11. Data SDM Kapanewon Purwosari berdasarkan pendidikan	25
Tabel 2.12. Data SDM Kapanewon Purwosari berdasarkan Jenis kelamin ..	25
Tabel 2.13. Data SDM Kapanewon Purwosari berdasarkan Golongan	25
Tabel 2.14. Data SDM Kapanewon Purwosari berdasarkan kelompok umur ..	25
Tabel 2.15. Data Sarana Prasarana dan Peralatan Mesin yang dimiliki	26
Tabel 2.16. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul	28
Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul	30
Tabel 2.18. Identifikasi permasalahan di Kapanewon Purwosari	31
Tabel 2.19. Sasaran Pembangunan Menurut Indikasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 ..	35
Tabel 2.20. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kapanewon Purwosari	36
Tabel 2.21. Matriks Identifikasi Lingkungan Strategis	38
Tabel 2.22. Kesimpulan Analisa Faktor Internal (KAFI)	39
Tabel 2.23. Kesimpulan Analisa Faktor Eksternal (KAFE)	40
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD	45
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	47
Tabel 3.3. Pentahapan Renstra PD	48
Tabel 3.4. Arah Kebijakan Renstra PD	49

Tabel 4.1.	Teknis Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD	52
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ..	70
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	85
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kapanewon Purwosari 7

Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Purwosari .. 8

Gambar 2.3. Grafik Penggunaan Lahan di Kapanewon Purwosari 8

Gambar 2.4. Grafik Jumlah Penduduk di Kapanewon Purwosari 9

Gambar 2.5. Grafik Jumlah Keluarga di Kapanewon Purwosari 10

Gambar 2.6. Grafik Jumlah Pasar, Toko, Kios, dan Warung 15

Gambar 2.7. Grafik Potensi Pariwisata di wilayah Kapanewon Purwosari 15

Gambar 2.8. Bagan Struktur Organisasi 24



LAMPIRAN XLV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON PURWOSARI
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah kepala dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tersebut merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai Dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJM ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) sebagai tindaklanjuti atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun dan menetapkan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029. Pada saat proses penyusunan dan penetapan dokumen tersebut, masih berlaku ketentuan lama yang mengatur urusan pemerintah daerah dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya sebagai tindak amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut, terjadi perubahan dalam susunan perangkat daerah yang berakibat adanya ketidaksesuaian dalam dokumen RPJMD terutama yang berkaitan dengan pengelompokan urusan dan penjabaran perangkat daerah pengampu pencapaian target sasaran. Menyikapi kondisi tersebut, dipandang perlu untuk dilaksanakan reviu.

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top-down*, dan *bottom-up*. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, salah satu rencana perangkat daerah adalah Renstra PD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan Renstra PD dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

A. Keterkaitan Dokumen Perencanaan

1. Rencana awal Renstra PD dengan Rencana awal RPJM. Rancangan awal RPJM menjadi acuan dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana awal Renstra PD disesuaikan dengan permasalahan prioritas yang akan ditangani PD.
2. Rencana awal RPJM dengan RPJM Teknokratis. RPJM Teknokratis sebagai bahan penyusunan Rencana awal RPJM dengan memaduserasikan pada visi misi Kepala Daerah terpilih.
3. Rencana awal Renstra PD dengan Renstra K/L (Kementerian/ Lembaga) dan PD Provinsi. Rencana awal Renstra PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

B. Tahapan Penyusunan

Sesuai permendagri 86 tahun 2017 dalam pasal 108 disebutkan persiapan penyusunan Renstra PD adalah :

1. Penyusunan Rancangan keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan Daerah berdasarkan SIPD;
4. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD.

C. Cakupan Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan (*diambilkan dan ditambahkan dari RPJM Teknokratis*);
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis (*diambilkan dan ditambahkan dari RPJM Teknokratis*);
5. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD (*diambilkan dan ditambahkan dari RPJM Teknokratis*);
6. Perumusan dan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan;
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJM.

1.2 . Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pedoman penyusunan Renstra PD ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 ke dalam Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tujuan penyusunan pedoman penyusunan Renstra PD adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi PD dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas jangka menengah PD.
2. Memberikan arah bagi PD dalam penentuan target kinerja jangka menengah PD.

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Rencana Strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang bersih, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,

mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, hambatan dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kapanewon Purwosari ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Letak Geografis dan Data Kewilayahan
 - 2.1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
 - 2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan dan Kemitraan
 - 2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra PD
- 3.2. Sasaran Renstra PD
- 3.3. Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KAPANEWON PURWOSARI

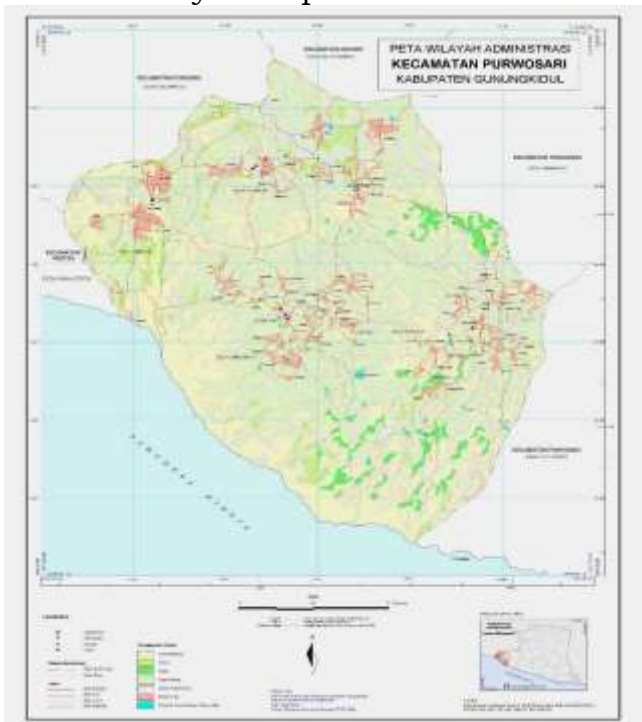
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Kapanewon Purwosari dalam menjalankan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kapanewon Purwosari dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kapanewon Purwosari periode sebelumnya. Mengemukakan program prioritas Kapanewon Purwosari yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJM periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1.1. Letak Geografis dan Data Kewilayahan

Koordinat	LS (S) 08° 00' 01,1"
Geografi	BT (E) 110° 22' 53,8" . Ketinggian DPL 354 m
Batas wilayah	Di sebelah Barat berbatasan dengan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, Sebelah Utara berbatasan dengan Kapanewon Pundong dan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Sebelah Timur berbatasan dengan Kapanewon Panggang, Sebelah Selatan adalah Samudera Hindia
Jarak Orbitasi	Ke Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul : 45 Km, Ke Ibu Kota Provinsi D.I.Yogyakarta : 35 Km.
Luas Wilayah	71,76 Km ² .

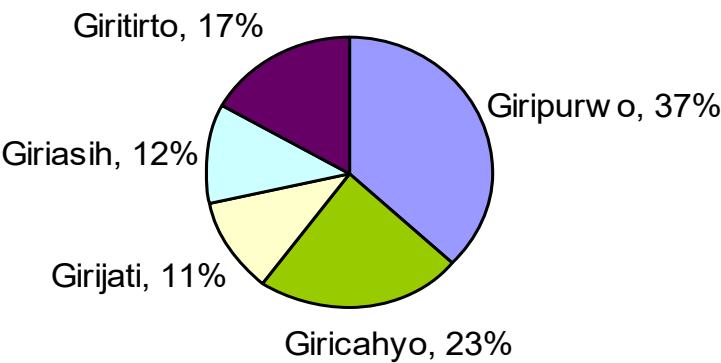
Gambar. 2.1.
Peta Wilayah Kapanewon Purwosari



Sumber : Jawatan Praja Kapanewon Purwosari

Gambar. 2.2.

Persentase Luas Wilayah Kalurahan Di Kapanewon Purwosari

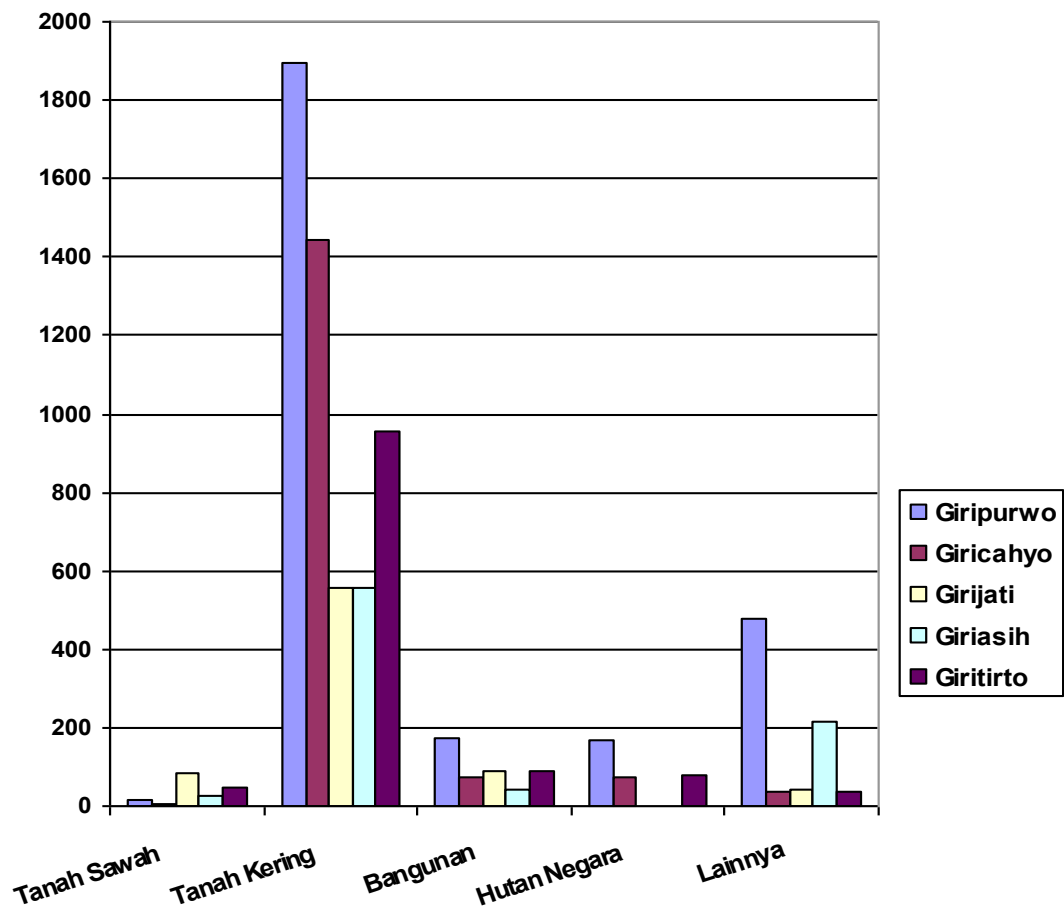


Sumber : Jawatan Praja Kapanewon Purwosari

Grafik penggunaan tanah di Kalurahan se-Kapanewon Purwosari yang terdiri dari lima Kalurahan : Kalurahan Giripurwo, Giricahyo, Girijati, Giriasih, Giritirto. Tersaji pada Grafik Penggunaan Lahan gambar 2.3

Gambar. 2.3

Grafik Penggunaan Lahan Di Kapanewon Purwosari



Sumber data grafik tanah diperoleh dari masing-masing Kalurahan yang ada di Kapanewon Purwosari dan Kecamatan Dalam Angka yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2024.



Wilayah administratif Kapanewon Purwosari terdiri dari 5 Kalurahan (total 32 Padukuhan, 229 RT, 32 RW), diantaranya:

- 1. Kalurahan Giripurwo (terdiri dari 10 Padukuhan, 98 RT, dan 10 RW);
- 2. Kalurahan Giricahyo (terdiri dari 7 Padukuhan, 45 RT, dan 7 RW);
- 3. Kalurahan Girijati (terdiri dari 4 Padukuhan, 21 RT, dan 4 RW);
- 4. Kalurahan Giriasih (terdiri dari 4 Padukuhan, 14 RT, dan 4 RW);
- 5. Kalurahan Giritirto (terdiri dari 7 Padukuhan, 51 RT, dan 7 RW).

Jumlah penduduk keseluruhan di setiap kalurahan di Kapanewon Purwosari berikut tersaji dalam tabel di bawah :

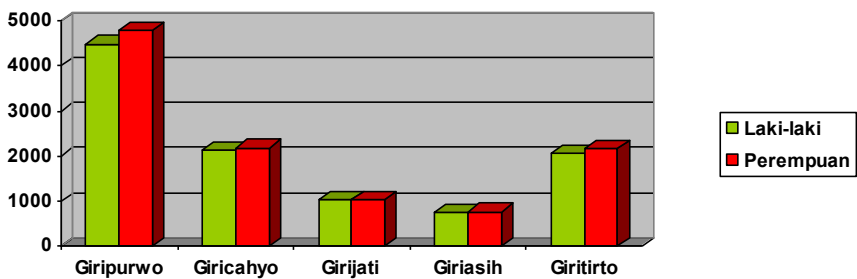
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk di Kapanewon Purwosari

No	Kalurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Giripurwo	4.479	4.786	9.265
2.	Giricahyo	2.129	2.186	4.315
3.	Girijati	1.045	1.028	2.073
4.	Giriasih	747	774	1.521
5.	Giritirto	2.050	2.157	4.207
Jumlah		10.450	10.931	21.381

Sumber data Jumlah Penduduk diperoleh dari Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Semester I yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Grafik Jumlah Penduduk di Kalurahan se-Kapanewon Purwosari yang Tersaji pada Grafik Jumlah Penduduk pada gambar 2.4

Gambar. 2.4.
Grafik Jumlah Penduduk di Kapanewon Purwosari



Sumber Data Penduduk diperoleh dari Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Semester I yang di rilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

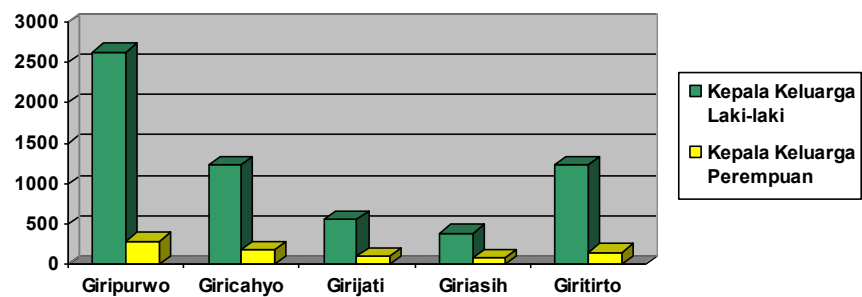
Data Jumlah Keluarga di Kapanewon Purwosari yang ada di masing-masing Kalurahan tersaji pada tabel 2.2

Tabel. 2.2. Jumlah Keluarga di Kapanewon Purwosari

No	Kalurahan	Jumlah Keluarga		
		Kepala Keluarga Laki-laki	Kepala Keluarga Perempuan	Jumlah
1.	Giripurwo	2.629	291	2.920
2.	Giricahyo	1.236	182	1.418
3.	Girijati	565	100	665
4.	Giriasih	394	89	483
5.	Giritirto	1.230	156	1.386
Jumlah		6.054	818	6.872

Sumber Data Jumlah Keluarga diperoleh dari Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Semester I yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Gambar. 2 5.
Grafik Jumlah Keluarga di Kapanewon Purwosari



Sumber Data Keluarga diperoleh dari Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Semester I yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Tabel. 2.3.

Jumlah Aparatur Pemerintah Kalurahan

No	Nama Kalurahan	Jumlah Aparatur			Total
		Lurah	Pamong Kalurahan	Staf Pamong Kalurahan	
1	GIRIPURWO	1	17	4	22
2	GIRICAHYO	1	14	4	19
3	GIRIJATI	1	11	6	18
4	GIRIASIH	1	11	5	17
5	GIRITIRTO	1	13	4	18
Jumlah se-Kapanewon :		5	66	23	94

Sumber data dari Jawatan Praja Kapanewon Purwosari dan Kalurahan

Keadaan tanah dan lokasi bangunan kantor Kapanewon Purwosari menempati tanah milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Luas

5.000 m². Dan Gedung Bangunan seluas kurang lebih 332 m² dengan kondisi baik. Sumber data dari Kasubbag Umum dan Jawatan Praja Kapanewon Purwosari

Data infrastruktur jalan dan Jembatan di setiap padukuhan yang ada di masing-masing Kalurahan se-Kapanewon Purwosari dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini

Tabel 2.4.
Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	RUAS JALAN / JEMBATAN YANG PERLU DITANGANI	LOKASI	PANJANG	LEBAR	JENIS PERKERASAN
	KALURAHAN GIRIPURWO				
1	Duwet - Pasar Klampok	Padk. Widoro	800 m'	6 m'	Jalan batu
2	Temon - Pantai Bekah	Padk.Temon	5000 m'	5 m'	Rabat beton
3	Klampok - Ngrupon	Padk. Klampok Padk.	5000 m'	5 m'	Rabat beton
4	Gumbeng - Mlarang	Gumbeng	2000 m'	5 m'	Rabat beton
5	Widoro - Cenguk	Padk. Widoro Padk.	5000 m'	5 m'	Rabat beton
6	Dulisen - Pangkah	Tlogowarak	5000 m'	1 m'	Pelebaran dan pemadatan
	KALURAHAN GIRICAHYO				
1	Karangtengah - Giriasih	Padk.Karangten gah	4000 m'	4 m'	Aspal
2	Karangtengah - Giriasih	Padk.Karangten gah	875 m'	4 m'	Rabat beton
3	Gabug - Girijati	Padk.Gabug	2750 m'	4 m'	Aspal
4	Jati - Kedangan	Padk. Jati	4000 m'	4 m'	Jalan tanah
5	Mbali - Guo cemplong	Giricahyo	4000 m'	4 m'	Rabat beton
6	Jati - Lueng ombo	Padk. Jati	3500 m'	2 m'	
7	Sambi - Mlua	Giricahyo	4000 m'	2 m'	
8	Gabug - Gupit	Padk. Gabug	3000 m'	4 m'	Jl batu
9	Nglumbung - Gelang	Pad Nglumbung	1000 m'	3,5 m'	Cor blok
	KALURAHAN GIRIJATI				
1	Jorong - Geger	Padk. Jorong	3000 m'	6 m'	Aspal
2	Jalan lingkungan Watugajah	Padk. Watugajah	2100 m'	4 m'	Rabat beton
3	Jalan lingk Dringo	Padk. Dringo	3000 m'	4 m'	Rabat beton
4	Dringo - JJLS	Padk. Dringo	1500 m'	4 m'	Aspal
5	Jalan lingkungan Parangrejo	Padk. Parangrejo	2500 m'	4 m'	Rabat beton
	KALURAHAN GIRIASIH				
1	Jalan antar Kalurahan Giriasih – Giricahyo	Perempatan Trasih, Tlogopopok	500 m 800 m	6 m	Batu, Corblock, Aspal
2	Jalan antar Kalurahan Ngoro-oro – Giricahyo	Padk. Ngoro- oro	4500 m 300 m	6 m	Batu, Corblock, Aspal
3	Jalan antar Dusun Wonolagi, Ngoro-oro, Trasih, Klepu	Padukuhan. Wonolagi, Ngoro-oro,	3500 m	6 m	Batu, Corblock, Aspal

		Trasih, Klepu			
4	Jalan antar Kalurahan Giriasih – Girijati	Padk. Trasih, Jorong	2250 m	2 m	Corblock
5	Jalan Usaha Tani, Ngoro-oro, jeruk gulung	Padk. Ngoro-oro, Jeruk gulung	1500 m	5 m	Corblock
6	Jalan antar Kalurahan Ngoro-oro Giriasih, Tompak, Giritirto	Gunung butuh, Sumberan, Tompak, Giritirto	2000 m	4,5 m	Corblock
	KALURAHAN GIRITIRTO				
1	Jalan antar Kalurahan antar Kapanewon Ploso - Gading – Banyumeneng	Ploso, Gading	3000 m'	6 m'	Aspal
2	Jalan wisata Gua Cerme Ploso - Gua cerme – Ngepal	Ploso, Gading	3500 m'	6 m'	Pelebaran dan Aspal
3	Jalan lingkari Ibu Kota Kapanewon Nglepok - Gading	Nglepok, Gading	2500 m'	5 m'	Aspal 1km, 1,5 Jl batu
4	Jalan Kabupaten : Petoyan - Jombang – JJLS	Giritirto, Giripurwo	4500 m'	6 m'	Aspal
5	Jalan poros Kalurahan : Wonoboyo – Blado – Jorong	Ploso, Blado	3000 m'	6 m'	Pelebaran

Sumber data infrastruktur jalan dan jembatan ini di peroleh dari masing-masing Kalurahan yang ada di Kapanewon Purwosari.

Jumlah pemenuhan air yang terdiri dari beberapa sumber air di masing-masing padukuhan di setiap kalurahan di Kapanewon Purwosari tersaji dalam tabel 2.5

Tabel. 2.5.
Pemenuhan kebutuhan air bersih

NO	PADUKUHAN	JML. PENDUDUK	JML KK	JUMLAH PRASARANA (UNIT)				
				MATA AIR / TELAGA	PAH	SIPAS	SUMUR BOR	SUMUR
	KALURAHAN GIRIPURWO							
1	Widoro	1.158	256	2	39	-	-	56
2	Klampok	1.390	292	-	30	-	-	59
3	Gumbeng	588	120	-	15	-	-	15
4	Sumur	1.147	266	4	29	-	-	30
5	Gubar	1.030	217	2	56	-	-	17
6	Karangnongko	689	149	1	139	-	-	3
7	Temon	792	128	-	127	-	1	-
8	Tlogowarak	953	187	2	185	-	-	-



9	Kacangan	930	128	-	92	-	-	4
10	Jlumbang	585	122	1	117	-	-	1
Jumlah		9.265	2.920	12	829	-	1	185
KALURAHAN GIRICAHYO								
1	Gabug	595	176	2	176	1	-	-
2	Wuni	394	112	2	112	-	-	-
3	Karangtengah	652	199	1	199	-	-	-
4	Jurug	299	93	-	93	-	-	-
5	Nglumbang	765	209	-	209	-	-	-
6	Jati	800	173	-	173	-	-	-
7	Jambu	610	239	-	239	-	-	-
Jumlah		4.315	1.418	5	1.201	1	-	-
KALURAHAN GIRIJATI								
1	Jorong	359	96	4	-	1	-	30
2	Dringo	663	171	-	-	-	2	3
3	Parangrejo	584	151	-	-	-	1	12
4	Watugajah	530	150	1	-	-	-	44
Jumlah		2.073	665	5	-	1	1	89
KALURAHAN GIRIASIH								
1	Klepu	405	112	3	96	-	-	-
2	Trasih	401	98	3	75	-	-	1
3	Ngoro-oro	471	105	2	78	-	-	1
4	Wonolagi	269	62	1	49	-	-	2
Jumlah		1.521	483	9	268			4
KALURAHAN GIRITIRTO								
1	Petoyan	710	152	-	-	-	1	2
2	Nglegok	413	96	-	-	-	-	2
3	Gading	1.029	199	1	27	-	1	2
4	Susukan	239	56	1	-	-	-	3
5	Tompak	444	101	-	-	-	1	3
6	Ploso	806	190	1	-	-	-	-
7	Blado	543	118	1	21	-	-	2
Jumlah		4.207	1.386	4	48	-	3	14

Sumber Data : Jawatan Sosial Kapanewon

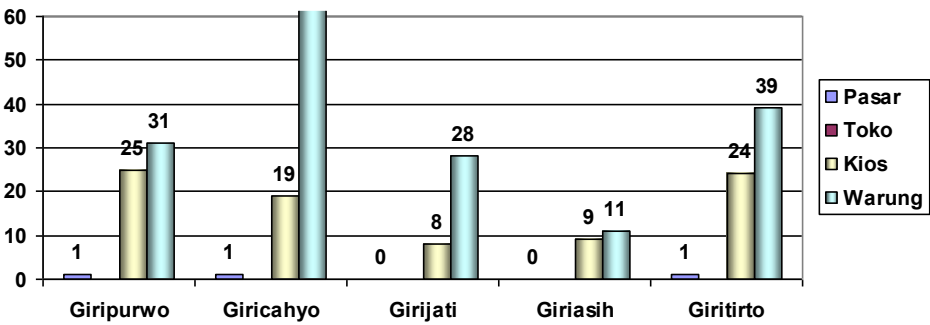
Tabel. 2.6.
Data Mata Air di Kapanewon Purwosari

NO	NAMA MATA AIR	LOKASI	DEBIT	KETERANGAN
1	Cacahan	Sumur Giripurwo	belum terukur	air minum
2	Kambil ketel	Sumur Giripurwo	belum terukur	air minum
3	Tangis	Sumur Giripurwo	belum terukur	air minum
4	Klampok	Klampok Giripurwo	belum terukur	air minum
5	Kali wetan	Karangnongko Giripurwo	belum terukur	air minum
6	Kali gede	Gubar Giripurwo	belum terukur	air minum
7	Gua Pego	Tlogowarak Giripurwo	belum terukur	air minum
8	Bekah	Temon Giripurwo	belum terukur	air baku
9	Gua Pelawan	Gabug Giricahyo	10 ltr/dtk	air minum / tenaga surya
10	Jombor	Wuni Giricahyo	belum terukur	air minum
11	Sendang Beji	Parangrejo Girijati	5 ltr/dtk	air minum dan irigasi
12	Gembiro wati	Parangrejo Girijati	belum terukur	air minum
13	Mudal	Watugajah Girijati	5 ltr/dtk	air minum dan irigasi
14	Ngresik	Watugajah Girijati	belum terukur	air minum
15	Kali Jambu	Dringo Girijati	belum terukur	air minum
16	Sumur Bor	Dringo Girijati	belum terukur	air minum
17	Kali Setro	Jorong Girijati	belum terukur	air minum dan irigasi
18	Kali Ngelo	Jorong Girijati	belum terukur	air minum dan irigasi
19	Kali Kroya	Jorong Girijati	belum terukur	air minum dan irigasi
20	Kali Adoh	Jorong Girijati	belum terukur	air minum
21	Kali Kidul	Klepu Giriasih	belum terukur	air minum
22	Manggung	Klepu Giriasih	belum terukur	air minum
23	Pego	Ngoro-oro Giriasih	belum terukur	air minum
24	Sumur bor	Klepu Giriasih	belum terukur	air minum
25	Kali Cabe	Blado Giritirto	belum terukur	air minum
26	Kali Wates	Blado Giritirto	belum terukur	air minum
27	Goa Pringombo	Ploso Giritirto	belum terukur	air minum
28	Sumur bor	Gading Giritirto	5 ltr/dtik	air minum
29	Ngeleng Petoyan	Susukan Giritirto	6 ltr/dtk	air minum dan irigasi
30	Sumur bor	Petoyan Giritirto	belum terukur	air minum

Sumber data ini di peroleh dari masing-masing Kalurahan yang ada di Kapanewon Purwosari.

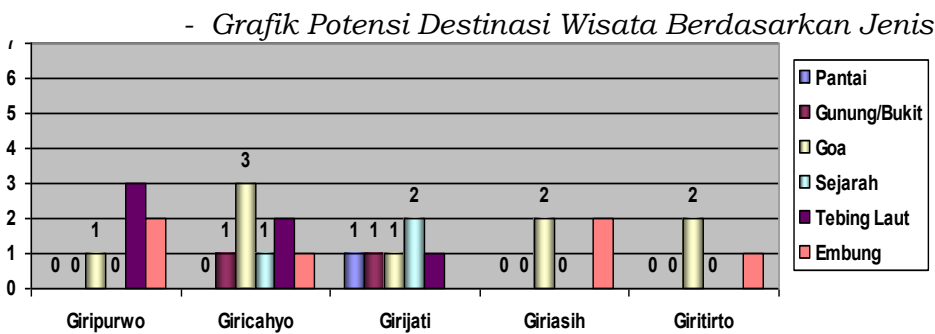


Gambar. 2.6.
 Grafik Jumlah Pasar, Toko, Kios, dan Warung di Wilayah Kapanewon Purwosari



Sumber : "Kapanewon Purwosari Dalam Angka", 2024, BPS Gunungkidul.

Gambar. 2.7.
 Grafik Potensi Pariwisata di Wilayah Kapanewon Purwosari



Sumber data dari Jawatan Kemakmuran Kapanewon Purwosari.

Kapanewon Purwosari memiliki potensi destinasi wisata yang menarik, meskipun sampai saat ini belum dikelola secara maksimal. Diantaranya :

- Tebing Laut Bekah (Giripurwo);
- Goa Terus (Giritirto);
- Goa Tapan (Girijati);
- Kawasan Tenaga Surya Goa Plawan (Giricahyo);
- Pantai Parangendog (Girijati);
- Embung Bembem (Giriasih);
- Telaga Seperang (Giripurwo);
- Telaga Gonggongan (Giripurwo);
- Telaga Ploso (Giritirto);
- Telaga Gading (Giritirto).

Adapun destinasi wisata di wilayah Kapanewon Purwosari yang sudah terkenal dan sudah dikelola antara lain :

- Bukit Paralayang Watugupit (Giricahyo);
- Sokha Bukit Senja (Giricahyo);
- Goa Langse (Giricahyo);
- Obelix Sea View (Giricahyo);
- Watu Paris (Giricahyo);
- Edge Resort Yogyakarta (Giricahyo);
- Situs Gembirwati (Girijati);
- Sendang Beji (Girijati);

- Queen of The South Resort Hotels & Restaurant (Girijati);
- Segara Giri Resto (Girijati);
- D’Girijati Hotel (Girijati);
- Obyek Wisata Goa Cerme (Giritirto);
- QOV Qur’anic Ocean View (Girijati).

Untuk mendukung kelancaran akses menuju kawasan wisata, ada inisiatif dari Pemkal maupun kelompok yang membangun *shuttle* transportasi wisata dan *rest area* mini di Gabug dan Wuni Giricahyo.

Tabel. 2.7.
Data Usaha Penginapan

No	Nama	Alamat	Jml Kamar	Nama Pemilik	Pengunjung rata-rata perbulan
1	Losmen Atas	Watugajah	10	Sukijan	18
2	Losmen Rahayu	Watugajah	14	Suhartono	28
3	Losmen Bukit Indah 2	Watugajah	10	Sudaryono	15
4	Losmen Amillia	Watugajah	5	Purjiyanto	14
5	Losmen Bukit Indah 1	Watugajah	11	Sudaryono	16
6	Losmen Bukit Paralayang	Parangrejo	6	Suyadi	14
7	Losmen Uddi Inn	Watugajah	10	Sri Nuningsih	22
8	Losmen Candra	Parangrejo	6	Chandra	12
9	Losmen Candra 2	Parangrejo	10	Chandra	12
10	Losmen Candra 3	Parangrejo	12	Chandra	12
11	Losmen Srikandi	Watugajah	12	R Didek CEP	12
12	Losmen Surat	Watugajah	4	Suratjiyem	8
13	Losmen Annisa	Watugajah	10	Parjiyo	20
14	Losmen Harin	Watugajah	10	Mukijan	20
15	Losmen Panorama 1	Parangrejo	8	Dhani	18
16	Losmen Panorama 2	Parangrejo	8	Dhani	18
17	Losmen Puncak I	Parangrejo	10	Slamet	22
18	Losmen Arjuna	Parangrejo	10	Yatini	22
19	Losmen Djoni	Parangrejo	6	Harsono	12
20	Losmen Carolina	Parangrejo	10	Purjiyanto	12
21	Losmen Budi Inn 2	Watugajah	20	Sri Sumarti	20
22	Losmen Budi Inn 4	Watugajah	20	Adi Trapsilo	20
23	Losmen Budi Inn 5	Watugajah	12	Purnomo	12
24	Losmen Bukit Serut	Parangrejo	7	Suwadi	15
25	Losmen Putra Tanjung	Parangrejo	6	Sapardi	10
26	Losmen Mawar Putih	Parangrejo	6	Sarwono	10
27	Losmen Asri	Parangrejo	8	Sri Susilowati	16
28	Losmen Nendro	Parangrejo	6	Sukarti	18
29	Losmen Sedap Nyaman	Parangrejo	8	Sulastri	16
30	Losmen Wahyu Beji	Parangrejo	6	Karmidi	12
31	Losmen Kinanti	Parangrejo	6	Sri Sumarti	12
32	Losmen Sopo Nyono	Parangrejo	6	Sunardi	12

Sumber Data : Jawatan Kemakmuran Kapanewon Purwosari

Tabel. 2.8.
Sarana Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	-
2	Puskesmas	1
3	Puskesmas Pembantu	3



4	PKD / Polindes	2
5	Pos Yandu	32
6	Dokter	3
7	Apoteker	1
8	Perawat	13
9	Bidan	6
10	Ahli Gizi	2
11	Dukun Bayi	-
12	Apotek / Toko Obat	1
13	Analisis Lab Kes	1

Sumber Data : Jawatan Sosial Kapanewon Purwosari

Tabel. 2.9.

Sarana Pendidikan Formal

No	Jenjang/Jenis Sekolah	Jumlah			
		Kepala Sekolah	Guru	Karyawan	Siswa
1	SD	13	114	29	1654
2	SMP	2	42	15	480
3	SMA	0	0	0	0
3	SMK	1	36	8	362
4	SLB	1	6	5	31

Sumber Data : Jawatan Sosial Kapanewon Purwosari

Tabel. 2.10.

Data Jumlah KK yang Rumahnya Belum Terinstalasi Jaringan Listrik PLN

No.	Kalurahan	Jumlah KK Belum Terinstalasi Jaringan Listrik PLN
1	Giripurwo	31
2	Giricahyo	30
3	Girijati	6
4	Giriasih	9
5	Giritirto	21
Total :		97

Sumber Data : Jawatan Sosial Kapanewon Purwosari

2.1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud kapanewon mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di wilayah kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai Kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di kapanewon;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran kapanewon;

- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. penyusunan rencana kerja sama;
- f. penyusunan perjanjian kinerja kapanewon;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan analisis dan penyajian data kapanewon;
- i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di kapanewon;
- j. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program kegiatan;
- k. Penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern kapanewon;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kapanewon;
- n. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kapanewon;
- o. Penyiapan bahan dan penatausahaan kapanewon;
- p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. Pelayanan administratif dan fungsional;
- r. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- s. Penyusunan dan penerapan norma standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- b. merumuskan kebijakan teknis subbagian perencanaan dan keuangan;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
- e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
- f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
- g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kapanewon;
- h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
- j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan Kapanewon;
- k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
- l. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Kapanewon;

- m. menyusun laporan keuangan;
- n. mengelola administrasi pendapatan;
- o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran Kapanewon;
- p. menyusun laporan kinerja Kapanewon;
- q. pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- s. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
- f. melaksanakan pengendalian internal Kapanewon;
- g. menyusun rincian tugas Kapanewon;
- h. mengelola urusan rumah tangga;
- i. mengelola barang milik daerah;
- j. melaksanakan hubungan masyarakat;
- l. menyusun rencana kerja sama;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Kapanewon.
- n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- o. mengelola perjalanan Kapanewon;
- p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- r. melaksanakan pengembangan pegawai;
- s. menyelenggarakan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- t. mengelola tata usaha kepegawaian;
- u. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- v. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- x. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- y. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Jawatan Praja mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Jawatan Praja;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Praja;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
- e. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;
- f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
- g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang;
- h. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- j. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
- k. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kalurahan;
- l. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan Kalurahan;
- m. melaksanakan pembinaan kepala Lurah dan Pamong Kalurahan;
- n. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengisian Lurah dan Pamong
- o. melaksanakan pembinaan penyusunan Peraturan Kalurahan;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan Kalurahan;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kalurahan;
- r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Kalurahan;
- s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Lurah dan Pamong Kalurahan;
- u. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah kerjanya;
- v. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon kepada Bupati;
- w. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Praja;
- x. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Tata Pemerintahan; dan
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Praja.

Jawatan Keamanan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Jawatan Keamanan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Keamanan;
- d. Menyusun rencana operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
- j. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- k. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Keamanan;
- l. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Keamanan.

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Jawatan Kemakmuran;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Kemakmuran;
- d. menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
- e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- h. menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembanagan serta pemantauan kegiatan dibidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;
- j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;



- k. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan;
- l. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- m. melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kalurahan;
- n. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Kemakmuran;
- o. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan; dan
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Kemakmuran.

Jawatan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Jawatan Sosial;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Sosial;
- d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
- e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejahteraan sosial;
- f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
- g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- j. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan transmigrasi;
- l. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- m. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga;
- n. menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- o. menyelenggarakan koordinasi dibidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;
- q. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
- r. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- r. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Sosial;
- s. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan
- t. melaksanakan montoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

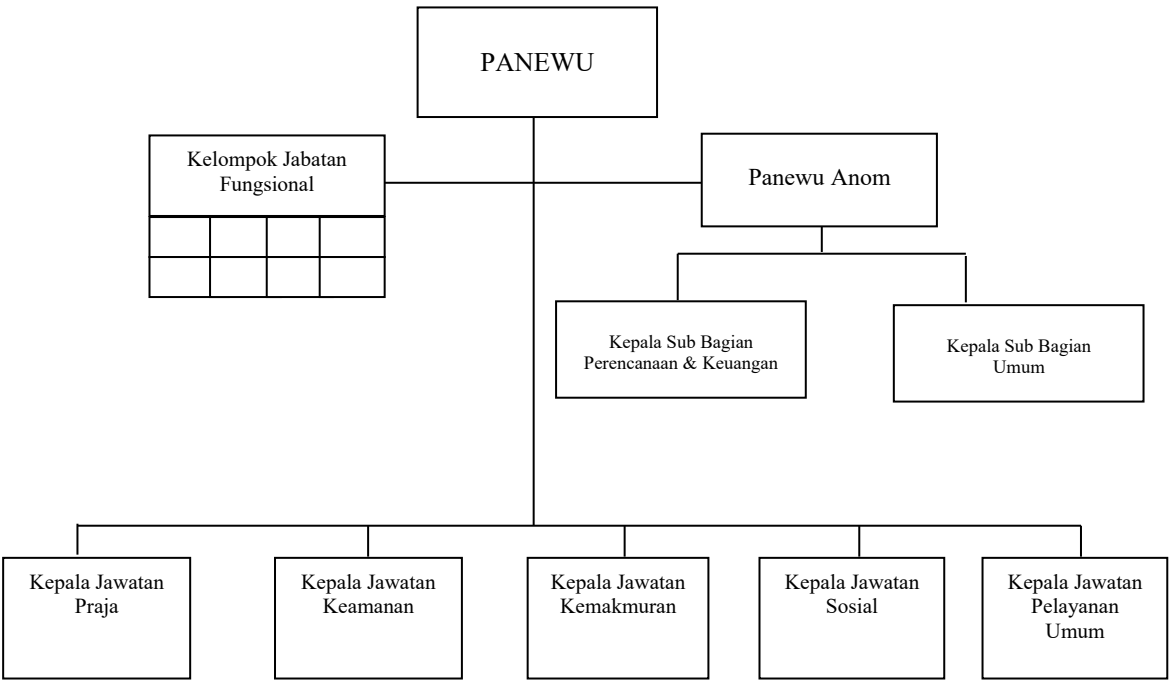
Jawatan Sosial.

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Jawatan Pelayanan Umum;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- d. menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum;
- e. melaksanakan pelayanan umum;
- f. melaksanakan administrasi terpadu Kapanewon;
- g. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- h. melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Pelayanan Umum;
- j. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Pelayanan Umum.

Struktur Organisasi Kapanewon Purwosari sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 dapat dilihat dalam bagan berikut :

Gambar. 2.8.
Bagan Stuktur Organisasi



2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia yang ada di Kapanewon Purwosari hanya 11 personil, untuk karyawan yang dibutuhkan minimal 22 personil jadi kurang sejumlah 11 personil, adapun sumber daya manusia (SDM) yang ada terdiri 1 Panewu, 4 Kepala Jawatan (Kepala Jawatan Praja, Kepala Jawatan Kemakmuran, Kepala Jawatan Keamanan, Kepala Jawatan Pelayanan Umum), ada 1 kekosongan jabatan Panewu Anom dan 1 kekosongan jabatan Kepala Jawatan Sosial. SDM dari unsur sekretariat: 1 Kasubbag Umum, 1 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan. SDM staf pelaksana hanya 4 personil. Untuk data lebih rinci tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.11
Data SDM Kapanewon Purwosari berdasarkan pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Personil
1	SMP	0
2	SMA/SMK/SMU Sederajat	2
3	D III	1
4	S1	6
5	S2	2
6	S3	0
	Jumlah	11

Sumber Data : Subbag Umum Sekretariat Kapanewon Purwosari

Tabel. 2.12
Data SDM Kapanewon Purwosari berdasarkan Jenis kelamin :

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Personil
1	9	2	11

Sumber Data : Subbag Umum Sekretariat Kapanewon Purwosari

Tabel. 2.13
Data SDM Kapanewon Purwosari berdasarkan Jenis Golongan :

No	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Jumlah Personil
1	1	8	2	11

Sumber Data : Subbag Umum Sekretariat Kapanewon Purwosari

Tabel. 2.14
Data SDM Kapanewon Purwosari berdasarkan kelompok umur :

No	Kelompok Umur	Jumlah Personil
1	s.d. 30 tahun	1
2	31 s.d. 40 tahun	0
3	41 s.d. 50 tahun	3
4	51 s.d. 60 tahun	7

Sumber Data : Subbag Umum Sekretariat Kapanewon Purwosari



Tabel. 2.15

Data Sarana Prasarana dan Peralatan Mesin yang dimiliki

Kapanewon Purwosari :

No	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Aula	1	Baik
3	Ruang Rapat	2	Baik
4	Ruang Pelayanan	1	Baik
5	Ruang Arsip / Record Center	1	Baik
6	Garasi	1	Baik
7	Rumah Dinas	1	Baik
8	PC Unit Komputer	7	Baik
9	Laptop	7	Baik
10	Printer	7	Baik
11	Scanner	1	Baik
12	Sound system	2	Baik
13	Proyektor LCD	1	Baik
14	AC Split	4	Baik
15	Kipas angin embun	2	Baik
16	Kipas angin	6	Baik
17	Digital Running Text	1	Baik
18	CCTV	1	Baik
19	Handy Talky	2	Baik
20	Pataka	2	Baik
21	Almari	12	Baik
22	Filling Cabinet	6	Baik
23	Harddisk External	1	Baik
24	Meja	46	Baik
25	Kursi	144	Baik

Sumber Data : Subbag Umum Sekretariat Kapanewon Purwosari

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan dan Kemitraan

Pelayanan di Kapanewon Purwosari, dapat dibedakan dalam dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan rekomendasi, legalisasi, dispensasi, konsultasi dan sebagainya. Sedangkan jenis pelayanan yang lain merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Kapanewon itu sendiri sebagai Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran layanan pada Kapanewon Purwosari adalah masyarakat dan Pamong kalurahan yang menjadi penerima utama berbagai bentuk pelayanan pemerintahan. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik mendapat akses terhadap pelayanan administrasi, sosial, dan pemberdayaan, sedangkan perangkat kalurahan memperoleh pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/kalurahan. Melalui pendekatan ini, kapanewon berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dan pemerintah kalurahan, guna mewujudkan pelayanan yang efektif, responsif, dan merata.

Mitra Pelayanan Kapanewon Purwosari dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di wilayah, yaitu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Kapanewon berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang diberikan oleh petugas operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi teknis yang memproses



dan menerbitkan dokumen tersebut yang di tempatkan atau ditugaskan pada lingkup ruang pelayanan di Kapanewon Purwosari. Kerja sama ini mendorong terciptanya pelayanan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh. Jenis permohonan yang dilayani antara lain : Perekaman & penerbitan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Pindah Penduduk, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Identitas Anak, dan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2.1.5. Kinerja Pelayanan PD Kapanewon Purwosari

Pelayanan oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih dijumpai kekurangan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih ada berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas sesuatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Mengacu pada RPJM 2021 -2026 Kabupaten Gunungkidul dan target sasaran yang ditetapkan oleh Kapanewon Purwosari melalui Rencana strategis (Renstra) serta realisasi kinerja pelayanan Kapanewon Purwosari tersaji dalam tabel 2.16.

Tabel 2.16
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Purwosari
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon				79,10	19,20	79,40	79,60	79,80	81,09	82,69	85,24	85,85		1	1	1	1	1
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD				80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	78,50	80,60	81,05			1	1	1	1	1
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan				2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1

Dari Tabel 2.16 dapat dibaca bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Purwosari Tahun 2021-2025 tidak mengalami kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan yang target telah tercapai disemua sector pelayanan diantaranya pengurusan ijin baik usaha ataupun non usaha, dimana telah menerapkan pelayanan satu pintu dengan optimal. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah sudah adanya komunikasi hierarki yang solid sehingga setiap permohonan pelayanan akan di layani dengan cepat.

2.1.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan kualitas pelayanan di Kapanewon Purwosari seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih belum optimal, sarana dan prasarana yang terbatas, kesadaran masyarakat tentang aturan birokrasi pemerintahan masih kurang, kondisi wilayah geografis, dan minimnya anggaran program pelayanan di kapanewon.

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan, keamanan yang kondusif, daerah wisata, pintu gerbang Barat Daya Kabupaten Gunungkidul, letak Kapanewon yang strategis, dukungan kalurahan dan masyarakat, dan pelayanan merupakan kebutuhan masyarakat serta telah dibukanya Jalan Jalur lintas Selatan Selatan (JJLS) yang sangat mendukung hal-hal tersebut diatas. Berdasarkan evaluasi pada Renstra Kapanewon Purwosari tahun 2021 – 2026 maka dapat diketahui faktor-faktor kekurangan/kelemahan dan peluang yang bisa dijadikan arah dan tujuan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1. Tantangan

- a. Meningkatnya kerusakan alam dan lingkungan
- b. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah
- c. Kondisi alam geografis dan medan yang berat
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- e. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam bidang pariwisata dan UMKM

2. Peluang

- a. Potensi pertanian, peternakan, kerajinan rakyat dan pariwisata
- b. Kamtibmas relatif kondusif
- c. Ketersediaan sumberdaya air
- d. Semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan masyarakat
- e. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

Berdasarkan evaluasi Renstra Kapanewon Purwosari 2021-2026 maka dapat di ketahui faktor-faktor kekurangan/kelemahan dan peluang yang bisa dijadikan arah dan tujuan pencapaian Visi Misi lebih lanjut dari sisi pendanaan terlihat Tabel 2.17

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kapanewon Purwosari
Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	353.973.750	402.560.000	635.360.000	261.702.500		333.878.300	382.806.000	622.439.000	259.542.800		94	98	98				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1.791.190.817	2.068.997.887	1.349.299.409	1.230.675.320		1.550.550.483	2.037.768.650	1.336.160.827	1.216.613.368		94	98	98				
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	10.300.000	137.470.000	135.000.000	168.870.000		7.800.000	137.470.000	135.000.000	168.870.000		90	100	100				
JUMLAH	2.160.464.567	2.609.027.887	2.119.659.409	1.661.247.820		1.892.228.783	2.558.044.650	2.093.234.827	1.645.026.168		94	98	98				

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor yang mempengaruhinya diidentifikasi sebagaimana dalam tabel 2.18. berikut ini :

Tabel 2.18.

Identifikasi permasalahan di Kapanewon Purwosari

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Pengelolaan keuangan belum optimal	Anggaran Perangkat Daerah sangat terbatas	Program dan kegiatan yang sangat di- butuhkan tidak bisa terlaksana
2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum Optimal	Kualitas SDM nya masih rendah	Jumlah SDM sangat terbatas karena banyak PNS yang pensiun, dan belum ada rekrutmen CPNS
3	Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal	Sarana dan Prasarana masih terbatas sekali	Sistem Pelayanan yang belum optimal
4	Terbatasnya SDM Perangkat Kalurahan	Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kalurahan belum bisa berjalan secara optimal	Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan belum seluruhnya berjalan secara efektif
5	SDM Masyarakat masih relatif rendah	Pendapatan penduduk masih relatif rendah	Angka Kemiskinan masih cukup tinggi
6	Data Kemiskinan belum sesuai yang ada di lapangan	Terjadinya salah sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat	Sistem Jaminan Sosial masyarakat yang berkelanjutan belum menjangkau seluruh penduduk yang berhak
7	Komunikasi antara warga masyarakat dan pemerintah maupun swasta belum berjalan	Terjadi persepsi yang berbeda-beda dalam pemecahan suatu masalah sosial	Kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial belum efektif.
8	Sistem pendataan yang belum sempurna	Masih terjadi kesalahan data	Penanganan dan pelayanan masalah sosial bagi penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia dan penduduk rawan sosial lainnya dalam rangka mendorong kemandirian serta memberikan peluang untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan
9	Masih rendahnya kesadaran warga masyarakat akan	Banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah di sekolah	Harapan lama sekolah penduduk masih rendah

	arti penting dari pendidikan	menengah	
10	Sarana dan prasarana Pendidikan masih terbatas	Kegiatan belajar mengajar masih terbatas	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Belum terpenuhi
11	Kurikulum pendidikan yang sering berubah	Pemahaman terhadap kurikulum yang masih kurang	Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian akhlak mulia, untuk memberikan landasan pada keberlanjutan pendidikan, dan berorientasi pembentukan karakter kewirausahaan belum optimal.
12	Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan masih banyak Masyarakat yang mencari pelayanan kesehatan ke luar daerah	Biaya terlalu mahal bagi masyarakat miskin	Ketersediaan sarana pelayanan Kesehatan dasar dan tenaga medis belum memadai untuk menyelenggarakan layanan yang bermutu.
13	Arus Globalisasi menyebabkan budaya luar masuk dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat	Kurang filter dalam menyaring budaya luar yang masuk	Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal belum optimal
14	Pendataan Warisan Budaya belum dilaksanakan secara optimal	Banyak Warisan Budaya yang tergerus arus globalisasi	Pelestarian Nilai-nilai luhur Budaya, adat tradisi belum optimal
15	Pendidikan Karakter anak belum optimal	Banyak terjadi kenakalan remaja	Pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja
16	Banyak Angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan yang dibutuhkan.	Masih banyaknya angka pengangguran	Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan belum semua sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan antara lain :

1. Keterbatasan kuantitas dan kompetensi teknis sumber daya aparatur Kapanewon
2. Kondisi geografis wilayah yang berbukit dan sebagian rawan bencana
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pelayanan
4. Keterbatasan pendanaan
5. Keterbatasan ketrampilan angkatan kerja

6. Keterbatasan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat.

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah :

1. Semangat dan motivasi kerja dari aparaturnya Kapanewon dan Kalurahan yang tinggi
2. Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan baik
3. Koordinasi yang mantap dengan pemerintah Kalurahan dan instansi tingkat Kapanewon
4. Terbukanya akses informasi dan komunikasi
5. Terbukanya akses jalan jalur pantai selatan (Pansela)
6. Adanya lingkungan kerja yang kondusif
7. Tingginya semangat gotong-royong masyarakat
8. Tingginya kesadaran hukum masyarakat
9. Adanya sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata
10. Ketersediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan pemerintah D.I. Yogyakarta yang disampaikan oleh Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 sebagai berikut:

a. Isu Strategis Nasional

- Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
- Kemandirian melalui Swasembada Pangan, Air dan Energi;
- Pengembangan Infrastruktur;
- Memperkuat Daya Saing SDM;
- Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis SDA;
- Membangun dari Desa;
- Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata Kelola; dan
- Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan & Budaya.

b. Isu Strategis D.I. Yogyakarta

- Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan);
- Pengembangan Wilayah Selatan DIY;
- Perkembangan Teknologi Informasi;
- Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif;
- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- Penguatan RB dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
- Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borobudur Yogyakarta – Prambanan;
- Penguatan Ketahanan Pangan;

- Pelestarian dan Pengelolaan Budaya;
- Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan;
- Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
- Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital.

c. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan aktivitas ekonomi pada sektor riil yang berkelanjutan;
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik;
4. Peningkatan perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Gunungkidul dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak-hak politik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat padakhususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan

- kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.19.

Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

No.	Prioritas	Sasaran Daerah
1	Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap	Derajat taraf pendidikan masyarakat secara inklusif dan merata meningkat

No.	Prioritas	Sasaran Daerah
	merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.	
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Tanpa Terkecuali
		Terwujudnya masyarakat yang sejahtera
2	Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing
3	Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.	Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Daerah
4	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel
		Terwujudnya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan tenteram
5	Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tabel 2.20.

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kapanewon Purwosari

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	<i>Good Governance</i>	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					

	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					
--	---	--	--	--	--	--

Dalam menentukan isu-isu strategis dilakukan melalui analisis lingkungan internal, eksternal dan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal meliputi dua aspek yakni kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*). Yang dimaksud faktor kekuatan adalah faktor – faktor yang bersifat menguntungkan dan menjadi potensi untuk dikembangkan sehingga bisa menunjang / mendukung berbagai program kegiatan.

Sedang yang dimaksud dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah dalam organisasi dan dapat menghambat pelaksanaan program dan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasar analisis, faktor – faktor Lingkungan Internal yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kapanewon Purwosari adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk bekerja dengan baik.
- 2) Adanya kejelasan dan kepastian peraturan perundangan yang menjadi landasan keberadaan dan ketugasan Kapanewon Purwosari yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.
- 3) Adanya Koordinasi yang mantap. Hal ini dapat dilihat pada berbagai kegiatan dilingkup Kapanewon dan Kalurahan, termasuk dinas / instansi / UPTD yang senantiasa terjalin kerja sama dan saling memberikan dukungan untuk melaksanakan tugas dan mengatasi permasalahan yang ada.
- 4) Adanya motivasi dan semangat kerja yang tinggi dari aparat Kapanewon Purwosari dan Pemerintah Kalurahan, sehingga mampu mendorong dan meningkatkan kegiatan untuk semakin aktif dalam mempercepat penyelesaian tugas – tugas kedinasan.

b. Kelemahan

- 1) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM
- 2) Belum optimalnya kinerja Aparatur Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain prasarana kantor dan kelengkapan kerja.
- 4) Keterbatasan kompetensi teknis aparaturnya Kapanewon.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal meliputi Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threat*). Peluang adalah faktor dari luar organisasi yang dapat memberikan kontribusi positif untuk tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi. Sedangkan Ancaman adalah faktor dari luar organisasi yang dapat menghambat atau membahayakan jalannya organisasi dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan analisis, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi Kapanewon Purwosari dalam pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

- a. Peluang
 - 1). Kamtibmas relatif kondusif
 - 2). Semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan masyarakat
 - 3). Potensi peternakan, kerajinan rakyat dan pariwisata
 - 4). Ketersediaan sumberdaya air
 - 5). Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
- b. Ancaman
 - 1). Meningkatnya kerusakan alam dan lingkungan
 - 2). Kurangnya keterampilan masyarakat dalam bidang pariwisata dan UMKM
 - 3). Kondisi alam dan medan yang berat
 - 4). Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah
 - 5). Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Berikut kami sampaikan matriks identifikasi lingkungan Strategis Kapanewon Purwosari pada tabel 2.21.

Tabel 2.21.
MATRIKS IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN (S)	PELUANG (O)
1. Komitmen pimpinan yang tinggi. 2. Motivasi dan semangat kerja yang tinggi dari aparatur Kapanewon 3. Koordinasi yang mantap 4. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang jelas dan terarah 5. Kepastian dan kejelasan peraturan perundangan yang berkait dengan keberadaan dan ketugasan Kapanewon.	1. Kamtibmas relatif kondusif 2. Semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan masyarakat 3. Potensi peternakan, kerajinan rakyat dan pariwisata 4. Ketersediaan sumberdaya air 5. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

KELEMAHAN (W)	ANCAMAN (T)
1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang	1. Meningkatnya kerusakan alam dan lingkungan
2. Kinerja Aparatur Kapanewon Purwosari belum optimal	2. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam bidang pariwisata dan UMKM
3. Belum optimalnya pendayagunaan aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa.	3. Kondisi alam dan medan yang berat
4. Kompetensi teknis aparatur Kapanewon terbatas.	4. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah
5. Kuantitas aparatur Kapanewon kurang	5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Berikut kami sampaikan kesimpulan analisis faktor internal di Kapanewon Purwosari tersaji dalam tabel 2.22.

Tabel 2.22.

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

NO	FAKTOR – FAKTOR INTERNAL STRATEGIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
<u>KEKUATAN</u>					
1.	Motivasi dan semangat kerja yang tinggi dari aparatur Kapanewon	15	4	60	I
2.	Koordinasi yang mantap	10	3	40	IV
3.	Komitmen pimpinan	15	4	45	III
4.	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang jelas dan terarah	15	4	60	II
5.	Kepastian dan kejelasan peraturan perundangan yang berkait dengan keberadaan dan ketugasan Kapanewon.	10	3	30	V
<u>KELEMAHAN</u>					
1.	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang	20	4	80	I
2.	Kinerja Aparatur Kapanewon Purwosari belum optimal	15	3	45	III
3.	Belum optimalnya pendayagunaan aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa.	15	3	45	IV
4.	Kompetensi teknis aparatur Kapanewon terbatas.	10	3	30	V
5.	Kuantitas aparatur Kapanewon kurang	15	3	45	II

Berikut kami sampaikan kesimpulan analisis faktor eksternal di Kapanewon Purwosari tersaji dalam tabel 2.23.

Tabel 2.23.
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)

NO	FAKTOR – FAKTOR INTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
<u>PELUANG</u>					
1.	Kamtibmas relatif kondusif	10	3	30	II
2.	Semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan masyarakat	10	2	20	IV
3.	Potensi peternakan, kerajinan rakyat dan pariwisata	15	4	60	I
4.	Ketersediaan sumberdaya air	10	3	30	III
5.	Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah	10	2	20	V
<u>ANCAMAN</u>					
1.	Meningkatnya kerusakan alam dan lingkungan	15	4	60	I
2.	Kurangnya keterampilan masyarakat dalam bidang pariwisata dan UMKM	10	2	20	V
3.	Kondisi alam dan medan yang berat	10	3	30	III
4.	Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah	10	4	40	II
5.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	10	3	30	IV

Keterangan Simpulan :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
Reformasi birokrasi di Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum semua Perangkat Daerah mempunyai Standar Pelayanan. Di sisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.
Reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Permasalahan di bidang pendidikan akan diatasi dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di bidang kebudayaan akan dilakukan peningkatan fasilitas kekayaan budaya dan nilai tradisi dan pelestarian nilai budaya. Di bidang kesehatan ke depan akan diatasi dengan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diiringi dengan akreditasi Puskesmas, pendampingan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang terpadu lintas bidang. Untuk menurunkan angka pengangguran perlu diintensifkan pelatihan ketrampilan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru.

3. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

4. Belum optimalnya pengelolaan dan daya saing pariwisata.

Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional sehingga mampu bersaing dan menjadi daerah tujuan wisata terkemuka. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (*length of stay*) di Gunungkidul. Perkembangan kunjungan wisatawan yang meningkat belum diikuti dengan peningkatan lama tinggal wisatawan yang signifikan.

5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah untuk mewujudkan konektivitas dan akses antar wilayah untuk mendukung pariwisata

Infrastruktur di Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana publik sesuai rencana tata ruang terhadap Kalurahan pemanfaatan ruang.

Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat, infrastruktur perekonomian khususnya penunjang pariwisata juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya. Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, sarana perhubungan, ruang terbuka publik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan perekonomian dan pariwisata.

6. Percepatan pembangunan kawasan pesisir pantai selatan secara terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar”.

Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu menjadikan laut sebagai halaman muka dan bidang pertanian sebagai tulang punggung (*back bone*) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mengisi dan merealisasikan keistimewaan melalui pembangunan daerah di segala bidang secara terpadu dan sinergis.

7. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan lahan kritis dan sumber daya alam.

Terkait tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup Kapanewon Purwosari merupakan pintu gerbang utama barat selatan yang mau tidak mau mengikuti arus kemajuan pariwisata karena dampak dari pantai Parangtritis akan naik di Kapanewon Purwosari

baik itu secara efek ekonomi ataupun kriminalitas hanya saja antisipasi yang kita persiapkan. Mengingat tata ruang akan merubah situasi disekelilingnya seperti dibukanya jalur lintas selatan (JJLS) akan mempengaruhi :

1. Bidang perekonomian meningkat;
2. Transportasi lancar;
3. Investasi meningkat;
4. Harga jual tanah disepanjang JJLS otomatis akan tinggi;
5. Bidang pendidikan meningkat.

Namun efek dari terbangunnya tata ruang wilayah/ JJLS antara lain :

1. Angka kriminalitas meningkat;
2. Angka kecelakaan lalu lintas meningkat;
3. Meningkatnya PEKAT;
4. Problematika sampah dan kerusakan lingkungan;
5. Bagi orang yang belum siap adanya tata ruang wilayah hanya menjadi penonton.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Dengan demikian sinkronisasi antara RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Rencana Strategis Kapanewon Purwosari Tahun 2025-2029 dimulai dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Adapun tujuan Renstra PD Kapanewon Purwosari Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas.

3.2. Sasaran Renstra PD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah :

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan PD;
2. Sasaran Jangka menengah daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PD;
3. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi PD (Indikator Kinerja Utama);
4. Kelompok sasaran yang dilayani;
5. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
6. Isu-isu strategis PD yang sesuai dengan bidang layanan PD;
7. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
8. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan

9. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Purwosari beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kapanewon Purwosari

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)	96,20	96,30	96,40	96,50	96,60	96,70
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan	Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100
		penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase kegiatan sosial (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50

3.3. Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Rumusan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*Value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut , dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menterjemahkan visi dan misi Kepala Derah kedalam rencana kerja yang akuntabel. Segala

sesuatu yang secara langsung dimaksudkan. untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah :

1. Menerjemahkan strategi ke dalam bentuk operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan sasaran Perangkat daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap-tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal perangkat daerah;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Perumusan strategi pada Renstra Perangkat daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran setiap langkah yang akan dipilih;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih;
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, Peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats* dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Memetakan 9 Kekuatan/*strengths*, Kelemahan/*weaknesses*, Peluang/*opportunities*, dan Tantangan/*threats*) Perangkat daerah
 - b. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel di bawah.
 - c. Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui Metode SWOT Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029 : <i>Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban</i>			
Misi IV : Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		

- d. Untuk menghasilkan perumusan strategi yang selaras dengan pilihan kegiatan yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*) agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif, yaitu :
 1. Perspektif masyarakat layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya
 2. Perspektif proses internal : strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*Internal Businesss Process*).
 3. Perspektif Kelembagaan: Strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada system, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang
 4. Perspektif keuangan : strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effektiveness*) serta untuk mencapai manfaat terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

3.4. Arah Kebijakan PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran yang lebih rasional.
- Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.
- Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
- Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 3.3.
Pentahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Langkah-langkah perumusan Kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan :
 - a. Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi
 - b. Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran
3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel sebagai berikut :



Tabel 3.4.

Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan Mitigasi Bencana terhadap potensi gangguan keamanan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berisi program-program dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan publik dan bisa dirasakan oleh masyarakat hasil pembangunan tersebut. Program prioritas merupakan prioritas daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dalam satu periode kepemimpinannya. Program prioritas merupakan unggulan Bupati sebagai wujud pemenuhan visi dan misi daerah, berikut adalah program unggulan Daerah Tahun 2025-2029. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025-2029 menggunakan nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1. Uraian Program

Program merupakan dokumen tertulis yang hendak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan arahan penekanan untuk setiap urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian Kapanewon Purwosari dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Untuk lima tahun ke depan program yang disusun Kapanewon Purwosari sebanyak 8 program, selengkapnya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

4.2. Uraian Kegiatan

Untuk kegiatan yang disusun Kapanewon Purwosari sebanyak 18 kegiatan, selengkapnya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya meliputi :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, kegiatannya meliputi :
 - 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, kegiatannya meliputi :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 3.3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 3.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, kegiatannya meliputi :
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, kegiatannya meliputi :
 - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatannya meliputi :
 - 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, kegiatannya meliputi :
 - 7.1 Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, kegiatannya meliputi :
 - 8.1 Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Tabel 4.1.
Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari							
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Purwosari		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Purwosari		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kapanewon Purwosari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Purwosari	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kapanewon Purwosari	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				39.800.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				39.800.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Purwosari	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	39.800.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kapanewon Purwosari	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				39.800.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	39.800.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000				
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				39.800.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	39.800.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000				
7.01 - KECAMATAN				1.804.619.935,6		1.878.789.814,95		1.899.723.406,21		1.953.952.235,27		1.962.163.255,98				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.210.549.735,6		1.250.688.714,95		1.278.199.406,21		1.290.991.235,27		1.325.540.755,98				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	79,78	96	1.210.549.735,6	96,04	1.250.688.714,95	96,08	1.278.199.406,21	96,12	1.290.991.235,27	96,16	1.325.540.755,98	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kapanewon Purwosari			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.510.000		12.361.700		13.456.000		15.662.000		16.988.000				
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4	10.510.000	4	12.361.700	4	13.456.000	4	15.662.000	4	16.988.000				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		3							
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2							
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.300.000		2.827.000		3.310.000		4.841.000		5.425.000				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.300.000	2	2.827.000	2	3.310.000	2	4.841.000	3	5.425.000				
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		1.556.600		1.612.000		1.673.000		1.740.000				
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.556.600	1	1.612.000	1	1.673.000	1	1.740.000				
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				600.000		690.400		719.000		751.000		786.000				
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	600.000	1	690.400	1	719.000	1	751.000	1	786.000				
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		1.040.600		1.144.000		1.259.000		1.385.000				
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	1.000.000	2	1.040.600	2	1.144.000	2	1.259.000	2	1.385.000				
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				500.000		713.900		785.000		863.000		950.000				
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	500.000	2	713.900	2	785.000	2	863.000	2	950.000				
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000		3.343.100		3.477.000		3.625.000		3.787.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	3.000.000	17	3.343.100	17	3.477.000	17	3.625.000	17	3.787.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.110.000		2.190.100		2.409.000		2.650.000		2.915.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4	2.110.000	4	2.190.100	4	2.409.000	4	2.650.000	4	2.915.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				954.297.935,58		1.012.857.314,95		1.014.355.906,21		1.016.345.535,27		1.018.980.035,98		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	224	224	954.297.935,58	224	1.012.857.314,95	224	1.014.355.906,21	224	1.016.345.535,27	224	1.018.980.035,98		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				950.297.935,58		1.007.057.314,95		1.007.575.906,21		1.008.487.535,27		1.009.935.035,98		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	224	224	950.297.935,58	224	1.007.057.314,95	224	1.007.575.906,21	224	1.008.487.535,27	224	1.009.935.035,98		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.000.000		1.500.000		1.650.000		1.815.000		1.997.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.500.000	1	1.650.000	1	1.815.000	1	1.997.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.000.000		4.300.000		5.130.000		6.043.000		7.048.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	13	13	3.000.000	13	4.300.000	13	5.130.000	13	6.043.000	13	7.048.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.640.000		2.320.000		2.452.000		2.597.200		2.756.920		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	14	1.640.000	14	2.320.000	14	2.452.000	14	2.597.200	14	2.756.920		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.640.000		2.320.000		2.452.000		2.597.200		2.756.920		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	14	1.640.000	14	2.320.000	14	2.452.000	14	2.597.200	14	2.756.920		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				33.645.000		34.914.800		35.406.300		35.947.000		36.541.700		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	6	33.645.000	6	34.914.800	6	35.406.300	6	35.947.000	6	36.541.700		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				33.645.000		34.914.800		35.406.300		35.947.000		36.541.700		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	6	33.645.000	6	34.914.800	6	35.406.300	6	35.947.000	6	36.541.700		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.748.500,02		40.696.000		44.143.000		51.660.500		54.311.000		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	33.748.500,02	12	40.696.000	12	44.143.000	12	51.660.500	12	54.311.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		3.050.000		3.655.000		3.820.500		4.052.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.500.000	4	3.050.000	4	3.655.000	4	3.820.500	4	4.052.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.418.000,02		15.778.000		16.956.000		17.552.000		18.607.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	13.418.000,02	4	15.778.000	4	16.956.000	4	17.552.000	4	18.607.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.490.000		9.003.000		10.103.000		16.513.000		17.265.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	5.490.000	3	9.003.000	3	10.103.000	3	16.513.000	3	17.265.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.490.500		1.875.000		2.063.000		2.269.000		2.496.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	1.490.500	2	1.875.000	2	2.063.000	2	2.269.000	2	2.496.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.000.000		2.115.000		2.396.000		2.496.000		2.515.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.000.000	12	2.115.000	12	2.396.000	12	2.496.000	12	2.515.000		
				8.850.000		8.875.000		8.970.000		9.010.000		9.376.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16	6	8.850.000	6	8.875.000	6	8.970.000	6	9.010.000	6	9.376.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.874.200		15.859.000		40.945.000		13.140.000		48.454.000		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	0	50.874.200	2	15.859.000	2	40.945.000	0	13.140.000	2	48.454.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	2		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		0		1		0		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		5.000.000		7.000.000		0		10.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	0	0	2	5.000.000	2	7.000.000	0	0	2	10.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.887.000		10.859.000		11.945.000		13.140.000		14.454.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	2	1.887.000	5	10.859.000	5	11.945.000	5	13.140.000	5	14.454.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.987.200		0		22.000.000		0		24.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	48.987.200	0	0	1	22.000.000	0	0	1	24.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.329.100		26.426.100		27.946.100		31.741.600		32.815.100		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	24.329.100	4	26.426.100	4	27.946.100	4	31.741.600	4	32.815.100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12				12				12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36				36				36			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.555.000		1.567.000		1.601.000		1.662.000		1.728.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	1.555.000	4	1.567.000	4	1.601.000	4	1.662.000	4	1.728.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				22.174.100		24.199.100		25.619.100		29.281.000		30.209.100		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	22.174.100	36	24.199.100	36	25.619.100	36	29.281.000	36	30.209.100		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.000		660.000		726.000		798.600		878.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	600.000	12	660.000	12	726.000	12	798.600	12	878.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101.505.000		105.253.800		99.495.100		123.897.400		114.694.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	101.505.000	3	105.253.800	3	99.495.100	3	123.897.400	3	114.694.000				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		0		1									
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	141	141		141		141									
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		5		3									
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	13		13		13									
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.100.000		45.118.800		46.461.100		48.830.400		49.227.000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	141	141	42.100.000	141	45.118.800	141	46.461.100	141	48.830.400	141	49.227.000				
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		2.500.000		2.750.000		0		3.025.000				
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	5	2.500.000	3	2.750.000	0	0	3	3.025.000				
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.750.000		4.673.000		5.031.000		5.534.000		6.087.000				
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	13	4.750.000	13	4.673.000	13	5.031.000	13	5.534.000	13	6.087.000				
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.755.000		52.002.000		43.203.000		62.923.000		54.215.000				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	49.755.000	2	52.002.000	2	43.203.000	2	62.923.000	2	54.215.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				900.000		960.000		1.050.000		1.110.000		1.140.000	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kapanewon Purwosari	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	900.000	3	960.000	3	1.050.000	3	1.110.000	3	1.140.000		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		0		1.000.000		5.500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	4.000.000	0	0	1	1.000.000	1	5.500.000	1	1.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.000.000		5.154.600		5.670.000		6.237.000		6.860.000		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	5.000.000	100	5.154.600	100	5.670.000	100	6.237.000	100	6.860.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5.000.000		5.154.600		5.670.000		6.237.000		6.860.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	5.000.000	12	5.154.600	12	5.670.000	12	6.237.000	12	6.860.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.000.000		5.154.600		5.670.000		6.237.000		6.860.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	5.000.000	12	5.154.600	12	5.670.000	12	6.237.000	12	6.860.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				152.292.700		171.815.000		175.569.000		190.097.500		193.341.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	3.507.500	100	5.565.000	100	5.996.000	100	6.466.500	100	7.846.000	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kapanewon Purwosari	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				3.507.500		5.565.000		5.996.000		6.466.500		7.846.000		
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	30	3.507.500	30	5.565.000	30	5.996.000	30	6.466.500	30	7.846.000		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0				30		30		30			
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.507.500		3.600.000		3.800.000		3.900.000		4.950.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	30	3.507.500	30	3.600.000	30	3.800.000	30	3.900.000	30	4.950.000		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		1.965.000		2.196.000		2.566.500		2.896.000		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0	30	1.965.000	30	2.196.000	30	2.566.500	30	2.896.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	112.373.000	100	113.000.000	100	113.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				112.373.000		113.000.000		113.000.000		115.000.000		115.000.000		
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10	112.373.000	10	113.000.000	10	113.000.000	10	115.000.000	10	115.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				112.373.000			113.000.000				115.000.000			115.000.000
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10	112.373.000	10	113.000.000	10	113.000.000	10	115.000.000	10	115.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)	100	100	36.412.200	100	53.250.000	100	56.573.000	100	68.631.000	100	70.495.000		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				31.342.200		47.442.000		50.185.000		61.604.000		62.765.000		
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	3	31.342.200	3	47.442.000	3	50.185.000	3	61.604.000	3	62.765.000		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6	8		8		8		8		8			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				17.650.000		25.289.000		26.817.000		30.599.000		31.659.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6	8	17.650.000	8	25.289.000	8	26.817.000	8	30.599.000	8	31.659.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13.692.200		22.153.000		23.368.000		31.005.000		31.106.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	3	13.692.200	3	22.153.000	3	23.368.000	3	31.005.000	3	31.106.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.070.000		5.808.000		6.388.000		7.027.000		7.730.000		
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	5.070.000	3	5.808.000	3	6.388.000	3	7.027.000	3	7.730.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5.070.000		5.808.000		6.388.000		7.027.000		7.730.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	5.070.000	3	5.808.000	3	6.388.000	3	7.027.000	3	7.730.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				312.077.500		312.477.500		303.877.500		313.277.500		285.677.500		
Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	312.077.500	100	312.477.500	100	303.877.500	100	313.277.500	100	285.677.500	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kapanewon Purwosari	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				312.077.500		312.477.500		303.877.500		313.277.500		285.677.500		
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	6	312.077.500	6	312.477.500	6	303.877.500	6	313.277.500	6	285.677.500		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				312.077.500		312.477.500		303.877.500		313.277.500		285.677.500		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	6	312.077.500	6	312.477.500	6	303.877.500	6	313.277.500	6	285.677.500		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				106.230.000		116.278.000		117.805.000		129.386.000		129.125.000		
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	106.230.000	100	116.278.000	100	117.805.000	100	129.386.000	100	129.125.000	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kapanewon Purwosari	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				106.230.000		116.278.000		117.805.000		129.386.000		129.125.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	106.230.000	75	116.278.000	75	117.805.000	75	129.386.000	75	129.125.000		
	—													
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
—														
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				96.500.000		105.278.000		106.805.000		116.386.000		116.125.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	96.500.000	75	105.278.000	75	106.805.000	75	116.386.000	75	116.125.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	—			9.730.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000		13.000.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	9.730.000	4	11.000.000	4	11.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				18.470.000		22.376.000		18.602.500		23.963.000		21.619.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	18.470.000	100	22.376.000	100	18.602.500	100	23.963.000	100	21.619.000	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kapanewon Purwosari	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi				18.470.000		22.376.000		18.602.500		23.963.000		21.619.000		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	5	18.470.000	5	22.376.000	5	18.602.500	5	23.963.000	5	21.619.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5	1		3		0		1		0			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	10	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2.000.000		3.025.000		3.327.500		3.660.000		4.026.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	10	2	2.000.000	2	3.025.000	2	3.327.500	2	3.660.000	2	4.026.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.700.000		3.569.000		3.926.000		4.319.000		4.751.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Administrahon Desa (Dokumen)	14	14	2.700.000	14	3.569.000	14	3.926.000	14	4.319.000	14	4.751.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.200.000		3.400.000		3.600.000		3.800.000		4.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	5	3.200.000	5	3.400.000	5	3.600.000	5	3.800.000	5	4.000.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2.500.000		2.700.000		2.900.000		3.100.000		3.300.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5	1	2.500.000	1	2.700.000	1	2.900.000	1	3.100.000	1	3.300.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3.770.000		5.147.000		0		3.900.000		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5	1	3.770.000	3	5.147.000	0	0	1	3.900.000	0	0		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.300.000		2.400.000		2.500.000		2.600.000		2.700.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	2.300.000	1	2.400.000	1	2.500.000	1	2.600.000	1	2.700.000		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2.000.000		2.135.000		2.349.000		2.584.000		2.842.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.135.000	2	2.349.000	2	2.584.000	2	2.842.000		

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Purwosari	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Purwosari	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kapanewon Purwosari

TUJUAN PD										
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks	95,80	96,20	96,30	96,40	96,50	96,60	96,70	{{(20% x persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase KK miskin yang tertangani) + (20% x persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x persentase indeks kepuasan masyarakat}}

SASARAN PD

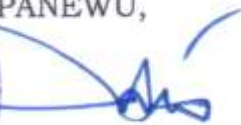
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Unit kerja penanggung jawab	Keterangan/ Rumus Formula
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kapanewon Purwosari	Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun-1. Dan rumus perhitungannya = Jumlah kalurahan yang menyusun RKPKal dengan benar dan tempat waktu/ Jumlah desa di wilayah kapanewon X 100
		Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kapanewon Purwosari	Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun-1. Dan rumus perhitungannya = Jumlah kalurahan yang menyusun APBKal dengan benar dan tempat waktu/ Jumlah desa di wilayah kapanewon X 100

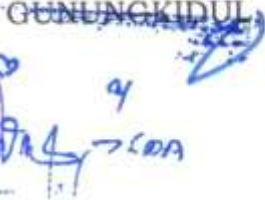
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Unit kerja penanggung jawab	Keterangan/ Rumus Formula
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kapanewon Purwosari	Jumlah kegiatan sosial terlaksana/Jumlah kegiatan sosial X 100
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kapanewon Purwosari	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terlaksana/ Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum X 100
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	78,98	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	Kapanewon Purwosari	Nilai ditentukan berdasar hasil survey kepuasan masyarakat

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Purwosari ini berlaku untuk Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Rumusan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra PD dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan akurat. Sehingga perlu keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak agar semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rencana Strategis diharapkan sebagai penentu arah dalam perencanaan dan penyusunan kegiatan maupun anggaran serta penentuan kebijakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Purwosari sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sehingga implementasinya diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi, partisipasi serta mengkoordinasikan perbedaan kepentingan, nilai maupun guna mendorong proses pengambilan keputusan yang realistis untuk mencapai keberhasilan dan tujuan yang diharapkan.

 PANEWU,

BARYONO BUANG PRASETYO

 BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH



METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM KAPANEWON PURWOSARI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)					(03)	(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)	(15)
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Purwosari	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan meliputi Adat, Tradisi, dan Seni yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinyatakan dalam bentuk persen	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh kegiatan kebudayaan yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan di kapanewon	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN													
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ponjong	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan yang direncanakan dibagi. Jumlah target dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, daftar rencana kegiatan tahunan, serta laporan fasilitasi pendampingan reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dais, dan monitoring-evaluasi kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari
7.01 - KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP t-1	Semakin tinggi nilai AKIP maka akuntabilitas kinerja semakin baik	Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	79,78	79,80	96,00	96,04	96,08	96,12	96,16	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	"(Jumlah Pelayanan Administrasi kapanewon terpenuhi ÷ Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang harus dipenuhi) x 100%"	Semakin tinggi persentase maka pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Melaksanakan fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan kapanewon	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi ÷ jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial ÷ jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Pramusrenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	(Jumlah Desa/ Kalurahan yang difasilitasi ÷ Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)					(03)	(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)	(15)
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan keteriban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif	(jumlah pembinaaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi + jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka koordinasi ketentraman dan ketertiban umum semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan + Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	(Jumlah kegiatan pembinaandan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan + Jumlah kegiatan pembinaandan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA KAPANEWON PURWOSARI

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)					(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kapanewon Purwosari														
ASPEK PELAYANAN UMUM														
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Indeks digunakan untuk mengukur pelayanan kepada masyarakat di kapanewon berdasarkan aspek penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, kegiatan sosial terlaksana, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dan indeks kepuasan masyarakat	{{(20% x persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+(20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana) + (20% x persentase indeks kepuasan masyarakat}}	Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa Kalurahan mampu menyusun APBKal dan RKPKal secara benar dan tepat waktu, melaksanakan kegiatan sosial secara optimal, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang baik, serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat		95,80	96,20	96,30	96,40	96,50	96,60	96,70	
2	Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu	%	persentase kalurahan yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPKal benar dan tepat waktu : total kalurahan di wilayah kapanewon) X 100 %	Nilai persentase yang tinggi menandakan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RKPKal yang tepat waktu dan sesuai aturan .	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	persentase kalurahan yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu : total kalurahan di wilayah kapanewon) X 100 %	Nilai persentase yang tinggi menandakan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai aturan .	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kegiatan Sosial	%	persentase kegiatan sosial terlaksana	(Jumlah realisasi kegiatan sosial yang terlaksana : total kegiatan sosial yang direncanakan) X 100 %	Nilai persentase yang tinggi menggambarkan bahwa kegiatan sosial yang direncanakan dapat terlaksana sesuai target, yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana : total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) X 100 %	Nilai persentase yang tinggi mencerminkan bahwa koordinasi ketenteraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada Masyarakat pengguna layanan	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada Masyarakat pengguna layanan	Nilai indeks yang tinggi menunjukkan survei kepuasan masyarakat yang baik, yang berarti pelayanan publik dinilai efektif, responsif, dan sesuai harapan pengguna layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,98	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	